



Komunikasi Politik Islam di Era Digital : Kajian terhadap Strategi Partai Islam dalam Pemilu

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Ria Aulia³, Alifa Anis Nur Anjani⁴, Fanany Laila Muqsin⁵

¹ UIN Raden Mas Said, Indonesia

² Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5} UIN Raden Mas Said, Indonesia

am.mustain.n@gmail.com^{1*}, haanifahnf27@gmail.com², riaa68743@gmail.com³, anjaniailifa118@gmail.com⁴, fananylaila@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com

Abstract. *This study explores the political communication strategies of Islamic parties in facing elections during the digital era in Indonesia. Using a qualitative normative approach, the research focuses on literature analysis, regulatory review, and interpretation of relevant legal documents. Findings show that Islamic parties actively utilize social media platforms such as Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube, along with official websites and digital applications to deliver political messages. Their communication strategies integrate religious messages with social, economic, and national issues, adopting a moderate and inclusive narrative to attract young, digitally active voters. Collaboration with influencers, religious leaders, and online communities also plays a significant role in expanding their outreach. However, challenges remain, including unequal technology access in rural areas, low digital literacy among certain groups, and the threat of disinformation that could damage political reputations. Additionally, digital campaign regulations in Indonesia are still inadequate. The study concludes that the success of Islamic political communication in the digital era depends on the ability to manage digital identity, engage with online communities, and respond adaptively to emerging issues. It recommends strengthening party cadres' digital capacities, improving public digital literacy, and enhancing regulatory frameworks to support a more inclusive and democratic political participation.*

Keywords: Campaign Strategy, Digital Era, Election, Islam, Political Communication

Abstrak. Penelitian ini membahas strategi komunikasi politik partai-partai Islam dalam menghadapi pemilu di era digital di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini fokus pada analisis pustaka, regulasi, dan dokumen hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa partai-partai Islam aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, serta situs web resmi dan aplikasi digital untuk menyampaikan pesan politik. Strategi komunikasi mereka menggabungkan pesan keagamaan dengan isu sosial, ekonomi, dan kebangsaan, dengan pendekatan moderat dan inklusif untuk menarik pemilih muda yang aktif secara digital. Kolaborasi dengan influencer, tokoh agama, dan komunitas online juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Meski demikian, terdapat tantangan berupa ketimpangan akses teknologi di daerah pedesaan, rendahnya literasi digital di beberapa kelompok masyarakat, serta ancaman disinformasi yang dapat merusak citra politik. Selain itu, regulasi kampanye digital di Indonesia masih belum memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan komunikasi politik Islam di era digital bergantung pada kemampuan mengelola identitas digital, membangun hubungan dengan komunitas online, dan merespons isu-isu secara adaptif. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas digital kader partai, edukasi literasi digital masyarakat, serta penguatan regulasi kampanye digital untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif.

Kata kunci: Strategi Kampanye, Era Digital, Pemilu, Islam, Komunikasi Politik

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komunikasi pada era digital berhasil mengubah peran media konvensional secara signifikan. Sehingga terjadi kemunculan media baru, atau yang disebut dengan media digital. Media ini berfungsi sebagai sarana yang mampu mengintegrasikan teks, suara, gambar, dan video dengan memanfaatkan teknologi komputer, yang berbeda dari media konvensional. Istilah "media baru" ini mengacu pada teknologi komunikasi digital berbantuan komputer dan terhubung ke jaringan internet. Dengan keberadaannya, media baru akan berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat mengubah pola hidup mereka, baik dalam aspek budaya, cara berpikir, serta komunikasi. Internet menjadi fondasi utama bagi lahirnya media baru, yang juga memengaruhi terciptanya bentuk interaksi sosial baru dalam kegiatan komunikasi manusia. (Meifilina, 2024)

Komunikasi politik adalah bagian dari proses politik dalam suatu masyarakat. Ini termasuk segalanya sejak awal pesan politik dan bagaimana pesan dapat diterima dan dipahami oleh masing-masing komunitas. Pentingnya dalam konteks penelitian ini adalah bahwa komunikasi politik adalah alat utama bagi entitas politik untuk membentuk opini publik, memobilisasi dukungan dan mempengaruhi pengembangan kebijakan. Informasi di era digital saat ini, di mana aliran informasi dapat berkembang dengan cepat dan luas, komunikasi politik semakin memainkan peran dalam membentuk kesadaran publik tentang masalah politik. (Kaphi et al, 2024)

Komunikasi politik juga sangat memiliki sebuah peran penting terhadap proses demokratisasi, yaitu terdapat pada persaingan kepentingan untuk mempengaruhi atau mempertahankan kekuasaan. Beberapa komunikator dari berbagai kalangan elit (penguasa) ataupun publik (yang dikuasai) memiliki keterlibatan dalam dinamika ini.

Fenomena komunikasi politik dalam masyarakat tak bisa dipisahkan dari dinamika politik yang melatarbelakanginya, terdapat dua aspek menarik dalam Komunikasi politik layak diperiksa. Pertama, komunikasi politik dalam sistem politik. Fenomena ini dikaitkan dengan mereka yang bertanggung jawab atas posisi dalam suprastruktur politik, baik eksekutif maupun legislatif, yang memiliki tanggung jawab untuk menyerap berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk kebijakan publik yang disampaikan kepada masyarakat melalui infrastruktur politik, melibatkan beragam kekuatan massa seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi non-pemerintah, media massa, serta kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Media politik dalam konteks kampanye sangat penting untuk dicatat. Dalam hal

ini, intisari politik, baik mereka yang telah melayani dan ingin mempresentasikan janji temu, mencoba untuk mencapai dukungan publik berkat berbagai strategi kampanye yang menggunakan kekuatan media massa. Proses komunikasi sosial atau politik didasarkan pada pengaruh antara individu dan strategi kampanye yang dilihat melalui media massa. Oleh karena itu, komunikasi sosial atau politik mungkin terkait dengan dua jenis pengaruh antara individu dan strategi kampanye.(Fikruzzaman & Ankesa, 2022)

Peran media sosial dalam pemilihan umum nasional ternyata memiliki kemampuan untuk memengaruhi preferensi suara para pemilih. Platform digital ini dipilih sebagai sarana kampanye yang cukup efektif dan biaya yang relatif rendah. Selain itu, media sosial juga dapat memfasilitasi berbagai aktivitas elektoral, termasuk memperluas jangkauan target kampanye yang sebelumnya sulit dilakukan melalui metode kampanye langsung. Penggunaan media sosial ini tidak hanya menjadi tren di tingkat nasional, tetapi juga dengan cepat menjalar ke kalangan politisi di tingkat daerah. Meskipun memiliki cakupan kekuasaan yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan yaitu berupaya untuk menciptakan citra diri yang persuasif, aktif, menarik, dan simpatik.(Widjayanto & Naim,2022)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menemukan aturan, prinsip atau doktrin yang relevan untuk memenuhi masalah di pusat penelitian. Penelitian ini normatif, menghadirkan solusi serta saran berdasarkan temuan penelitian hukum. Metode yang digunakan berfokus pada arah normatif atau Pengajarannya, dengan penekanan pada penelitian dokumen perpustakaan, seperti buku-buku, serta artikel di majalah atau jurnal.. Dengan pendekatan ini, kami berharap bahwa pemahaman yang mendalam tentang strategi komunikasi politik dibuat oleh Partai Islam.dalam pemilu di era digital.Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi beberapa aspek, yaitu(Nasoha,2024):

a. Pendekatan Konseptual

Pada Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan komunikasi politik, hak suara, dan partisipasi politik di era digital. Berbagai istilah seperti komunikasi politik digital, partisipasi pemilih, dan hak-hak politik dianalisis untuk mengetahui sejauh mana partai Islam memanfaatkan teknologi digital dalam berinteraksi dengan pemilih.

b. Pendekatan Historis

Dalam pendekatan historis, peneliti melacak evolusi strategi komunikasi politik partai Islam dari waktu ke waktu, khususnya dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Data historis sangat penting untuk memahami perubahan dalam pola komunikasi dan strategi yang diadopsi untuk menghadapi tantangan di era digital.

c. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini memanfaatkan sumber literatur dimana para peneliti fokus pada buku-buku, jurnal, Artikel serta materi relevan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Para peneliti membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis dokumen - dokumen ini untuk mengumpulkan informasi tentang konsep dan teori yang didukung oleh data sumber sekunder.

d. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh analisis secara kualitatif dengan analisis konten untuk mengidentifikasi model, tema dan argumen yang terkait dengan strategi komunikasi politik Islam dalam pemilihan umum pada periode digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Komunikasi Politik

Dasarnya kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “communico” yang berarti membagi, serta communis yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang maupun lebih atau “communicare” yang berarti "membuat sama". Sementara dalam bahasa Inggris disebut dengan communication yang berasal dari bahasa Latin, yaitu “communis” yang memiliki arti yang sama dengan kata communico, communication, atau communicare yang berarti menciptakan makna yang sama. Jadi komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara bersama. Sedangkan secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “poli” yang berarti kota atau negara kota. Yang kemudian, arti itu mengalami perkembangan sehingga menjadi polites yang berarti warga negara, sementara kata “politeia” yang memiliki arti semua yang berhubungan dengan negara, dan juga kata “politika” yang memiliki arti pemerintahan negara, dan “politikos” yang berarti kewarganegaraan. Dalam pengertian umum politik berarti bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Komunikasi politik juga memiliki tujuan yang sangat terikat dengan pesan politik yang dimana biasanya disampaikan oleh seorang yang disebut komunikator. Tujuan

tersebut hanya sekedar untuk menyampaikan sebuah informasi politik.(Sampurna et al,2024)

Tujuan komunikasi politik terkait erat dengan pesan -pesan politik yang ditransmisikan oleh media politik. Menurut berbagai tujuan komunikasi, komunikasi politik dapat bekerja hanya untuk mengirimkan informasi politik, membentuk gambar politik dan membentuk opini publik. Di samping itu, komunikasi politik mempunyai tujuan untuk dapat menarik simpati publik, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik, terutama menjelang pemilihan umum. Keberhasilan atau kegagalan seorang calon legislatif (caleg) sangat ditentukan oleh strategi komunikasi yang diterapkannya.(Alfiyani,2018)

Dalam rangka mendorong proses komunikasi politik di negara yang demokratis, peran dan fungsi partai politik menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan partai politik dalam sistem politik yang demokratis memainkan peran penting. Sistem politik dibangun tidak hanya berdasarkan organisasi, tetapi juga harus membawa makna yang lebih dalam pada implementasi nilai -nilai demokratis dalam masyarakat dan negara.(Waluyo,2019)

Politik Islam dan Partai islam

Politik islam adalah sebuah pengurusan kemaslahatan umat manusia di bawah hukum Syariah, politik islam juga memiliki arti dari semua tindakan yang membawa orang lebih dekat dan bersatu, bahkan jika Pun Rasrasullah tidak mendefinisikannya dan (bahkan) Allah tidak membentuknya. Teori Politik Islam Islam membahas penerapan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat.(Zawawi,2015)

Dalam Islam, istilah politik sering diungkapkan oleh kata-kata Al-Siyasah dan Daulah. Kata -kata ini, serta istilah -istilah lainnya, terkait erat dengan aspek -aspek politik, seperti keadilan dan pertimbangan, awalnya merujuk pada pertanyaan politik. Tujuan politik Islam adalah untuk menciptakan sistem pemerintah berbasis pemerintah dan hukum Islam. Salah satu pencapaian utamanya adalah berdiri Negara Islam atau Darul Islam.berikut sepuluh poin penting yang menjadi landasan sistem politik dan pemerintahan dalam Islam(Yusuf & Mawalidin,2022):

- a. Menjaga iman sesuai dengan prinsip -prinsip yang disepakati oleh para sarjana Muslim Saraf.
- b. Melakukan proses peradilan untuk menyelesaikan konflik masyarakat.
- c. Memastikan keamanan daerah Islam sehingga Muslim dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai.
- d. Menerapkan undang -undang yang ditentukan untuk melindungi hak asasi manusia.

- e. Menjaga perbatasan negara untuk terpapar potensi ancaman eksternal.
- f. Jihad melawan mereka yang menentang Islam.
- g. Mengelola perpajakan, zakat, dan sedekah dengan baik.
- h. Mengatur pengeluaran nasional dan menunjuk pegawai negeri yang kompeten dan jujur untuk memantau kemakmuran negara.
- i. Pengawasan dan inspeksi para pemimpin nasional untuk melindungi agama (Addin).

Dengan demikian, tujuan politik dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip syariat. (Yusuf & Mawalidin, 2022)

Sedangkan Partai Islam adalah partai yang secara jelas mengakui Islam sebagai ideologinya atau yang memiliki dukungan dari berbagai organisasi Islam. Muhtadi menyoroti perbedaan antara partai Islam dan gerakan sosial Islam. Ia menjelaskan bahwa partai Islam berfungsi sebagai sarana perjuangan yang bersifat konvensional melalui mekanisme formal, sedangkan gerakan sosial Islam beroperasi dalam bentuk wadah politik yang tidak formal. (Argenti, 2020)

Partai-partai Islam memiliki hubungan yang dekat dengan memahami interaksi antara Islam dan politik. Politik Islam terdiri dari berbagai partai politik dan gerakan yang berusaha menerapkan hukum Islam pada aspek kehidupan politik dan sosial. Dalam konteks ini, Olivier Roy menunjukkan bahwa partai dan gerakan Islam bertindak sebagai sekelompok aktivis yang menjadikan Islam ideologi politik berdasarkan pemahaman mereka tentang agama. Sementara itu, Anis Rashid Baswedan mengatakan politik Islam adalah upaya untuk memperjuangkan aspirasi dan kelompok-kelompok Islam yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan hukum dan pemerintah melalui proses pemilihan umum dan badan legislatif. Dengan demikian, gerakan untuk meng-Islamisasi masyarakat dalam kerangka demokrasi sangat berkaitan dengan keberadaan partai-partai Islam, menggunakan saluran-saluran demokrasi yang ada. (Yumitro, 2013)

Perkembangan Politik Diera Digital

Perkembangan teknologi terhadap dunia benar-benar lebih cepat dan lebih cepat. Di era digital ini, publik umumnya menerapkan gaya hidup baru yang tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik. Teknologi bertindak sebagai alat yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia, memungkinkan kita untuk menyelesaikan tugas dan bekerja lebih mudah. Peran penting dari teknologi ini membawa peradaban manusia ke era digital. Era digital telah menunjukkan perubahan positif yang berbedayang sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun, di saat yang bersamaan, era ini ada

juga dampak negatif, tantangan baru dalam kehidupan manusia. Tantangan yang muncul di era digital meliputi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, keamanan, dan bahkan teknologi informasi..(Setiawan,2017)

Demokrasi digital merujuk pada suatu konsep khusus mengenai demokrasi yang ditandai dengan penggunaan jaringan digital dan media yang meluas dalam konteks politik, baik daring (online), dan luring (offline) maupun menggabungkan keduanya. Dengan sejumlah besar orang Indonesia yang beroperasi di jejaring sosial, demokrasi digital membawa banyak keunggulan. Salah satunya adalah sumber baru untuk kebijakan baru, sebuah forum untuk membahas dan memobilisasi komunitas. Selain itu, demokrasi digital menciptakan kesetaraan akses dengan informasi, sehingga orang bisa mendapatkan informasi yang sama. Ini juga memastikan penerapan nilai-nilai kesetaraan, di mana kita harus membuat ruang yang aman untuk setiap individu bebas untuk mengekspresikan pendapat kita. Jika ada perbedaan dalam sudut pandang, penting bagi kita untuk membangun diskusi konstruktif untuk mengembangkan pemikiran dan pemahaman umum..(Annisa et al,2024)

Transformasi digital di era kemajuan teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan mendasar di semua aspek kehidupan, termasuk dalam ranah demokrasi. Perkembangan ini telah melahirkan metode baru dalam pelaksanaan demokrasi, salah satunya melalui penerapan sistem elektronik dalam proses pemilihan umum.(Sadam et al,2024)

Pertumbuhan politik nasional semakin menuju kedewasaan demokrasi saat ini sedang dipromosikan oleh pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan internet dan media baru, praktik media politik sekarang lebih banyak dilakukan melalui platform online. Namun, pemikiran dan konsep yang membentuk fondasi politisi dan kepribadian nasional masih berasal dari literatur standar tentang ilmu politik dan ilmu media. Penggunaan media internet dalam komunikasi politik adalah fenomena baru yang sangat menarik untuk penelitian yang lebih dalam. Dengan memasuki era reformasi, fenomena pertumbuhan dan pembangunan demokratis di negara itu menunjukkan arah yang positif, yang memperkuat prinsip-prinsip negara-negara demokratis. Prinsip-prinsip ini termasuk kedaulatan orang, kebebasan berpandangan, hukum dan aplikasi hak asasi manusia.(Waluyo,2019)

Dalam konteks pemilihan umum, mekanisme voting memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan pemenang di setiap kontestasi pemilu. Selain itu, voting juga berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan aspirasi

masyarakat, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pemungutan suara secara kolektif. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya pemungutan suara dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan sistem voting memerlukan aturan dan metode yang tepat untuk menjamin keadilan dan transparansi. (Sadam et al, 2024)

Dengan kehadiran media baru yang berbasis digital telah mengubah cara informasi politik disebarkan, menjadikannya tidak hanya lebih masif, tetapi juga cepat dan interaktif. Karena karakteristik ini, banyak Entitas politik di berbagai negara menggunakan media sosial selama kampanye mereka. Selain itu, media baru juga dapat menjangkau pemilih muda dengan biaya yang relatif rendah. (Anshari, 2013)

Strategi Komunikasi Partai Politik Islam Diera Digital

Strategi komunikasi politik pada dasarnya melibatkan Serangkaian langkah dalam implementasi komunikasi yang terkait dengan produksi, penyebaran, penerimaan dan dampak informasi yang terkait dengan politik. Proses ini terjadi melalui interaksi manusia atau oleh media massa. (Alfiyani, 2018)

Pada dasarnya, strategi dalam komunikasi politik mencakup seluruh keputusan yang diambil berdasarkan kondisi saat ini, mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan politik di masa depan. Oleh karena itu, mempertahankan citra seorang pemimpin politik, baik politisi maupun pemimpin partai politik dan memperkuat institusi partai politik adalah langkah yang paling tepat dalam komunikasi politik untuk mencapai tujuan politik di masa depan. (Waluyo, 2019)

Strategi komunikasi politik Islam di era digital, menyoroti pentingnya memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan politik yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif historis untuk menelusuri evolusi komunikasi politik Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. (Sarkawi et al, 2025)

Di era digital saat ini, ada banyak pengaturan interaktif yang berbeda yang dapat menjadi stimulasi bagi masyarakat untuk memahami dinamika politik di daerah mereka. Penggunaan survei elektronik, referendum elektronik dan suara elektronik telah menunjukkan perubahan signifikan di era demokratis, yang memungkinkan partisipasi warga negara melalui peralatan modern. Prospek demokrasi digital berdasarkan media baru memiliki dampak yang sangat menjanjikan dalam mengembangkan media politik, dengan tujuan akhir meningkatkan partisipasi politik. Dorongan ini juga diaktifkan oleh penampilan kelompok-kelompok masyarakat yang seragam dan peningkatan tingkat

ekonomi, pendidikan dan sosial. Komunitas semakin memahami partai -partai politik dan bagaimana menerapkan praktik pemasaran politik yang berbeda untuk mematuhi kepentingan mereka.(Boestam et al,2023)

Di era modern ini, dukungan media digital, seperti media sosial, memfasilitasi penyebaran pesan politik secara luas dan cepat. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan serius seperti penyebaran hoaks, manipulasi informasi, dan polarisasi politik. Penelitian ini menekankan bahwa strategi komunikasi politik Islam yang efektif harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral, sesuai dengan ajaran Islam.(Sarkawi et al,2025)

Pihak-pihak (partai) yang memahami desain dan pemasaran di media digital, serta penggunaan internet sebagai media politik, yang dapat lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya mereka. Dengan rentang yang sangat luas, Internet memungkinkan Anda untuk mengirimkan pesan dengan cepat dan dapat mengakses objek lebih luas. Berkat konten yang menarik dan situs web yang dikelola dengan baik, pesta yang ditingkatkan visibilitasnya di tengah masyarakat.(Suryadi et al,2021)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Di era digital ini, komunikasi politik mengalami banyak perubahan, terutama bagi partai-partai politik Islam di Indonesia. Penelitian ini meneliti cara mereka menggunakan media digital untuk kampanye dan mengajak pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai-partai tersebut menggunakan strategi komunikasi digital untuk meningkatkan dukungan mereka. Dengan menggunakan beragam media sosial agar dapat menyebarkan berbagai pesan politik hingga melibatkan para pemilih.

Partai-partai Islam tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga membangun citra politik. Mereka bekerja sama dengan influencer dan tokoh agama untuk memperkuat pesan Islam moderat. Konten kampanye disajikan dalam berbagai format menarik, seperti video pendek dan meme, untuk menarik perhatian audiens. Namun, ada tantangan seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi politik yang dapat merugikan citra partai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk memastikan komunikasi politik di dunia digital tetap etis dan sesuai dengan nilai demokrasi.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, komunikasi politik Islam di era digital berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, partai-partai Islam bisa memperkuat pengaruh politik mereka. Namun,

strategi yang digunakan harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan transparansi. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan platform media juga penting untuk menciptakan ekosistem yang sehat.

Saran untuk partai politik Islam meliputi mengembangkan strategi berbasis data, meningkatkan edukasi politik untuk mencegah penyebaran hoaks, dan memperkuat regulasi kampanye digital. Keseluruhan, era digital memberi peluang bagi partai politik Islam, tetapi mereka harus menghadapi tantangan untuk manfaat maksimal bagi demokrasi di Indonesia.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi politik Islam di era digital, partai-partai Islam perlu memperkuat literasi digital di kalangan kader dan simpatisannya. Hal ini penting agar mereka dapat memanfaatkan media sosial dengan lebih optimal dan menghindari penyebaran informasi yang tidak valid. Selain itu, pemanfaatan teknologi big data juga harus ditingkatkan untuk memahami preferensi pemilih dengan lebih akurat, sehingga strategi kampanye dapat disusun dengan lebih terarah.

Pemerintah dan otoritas terkait juga diharapkan merancang regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam dunia politik, sehingga kampanye digital dapat berlangsung dengan transparansi dan tanggung jawab. Selanjutnya, partai-partai Islam perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan para influencer Muslim yang memiliki pengaruh besar di media sosial, guna menyebarkan pesan politik yang positif dan edukatif.

Terakhir, pengembangan konten digital yang inovatif dan interaktif sangat penting untuk menarik perhatian pemilih, terutama dari kalangan generasi muda, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses politik.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiyani, N. (2018). Media sosial sebagai strategi komunikasi politik. *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Annisa, V., Sumantri, P., & Azis, A. (2024). Peranan Tokoh Intelektual Muda dalam Perkembangan Politik di Indonesia pada Era Digital. *Polyscopia*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1235>
- Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 8(1).
- Argenti, G. (2020). Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1).

- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N. (2023). Upaya Partai Politik dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual di Era Digital. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(1), 1–17.
- Fikruzzaman, D., & Ankesa, H. (2022). Komunikasi politik partai Islam menjelang pemilu. *Tabayyun: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(1), 35–46. <https://ejournal-stidkibogor.ac.id/index.php/tabayyun>
- Kahpi, M. L., Siregar, A. S., & Romadon, S. (2024). Dinamika Komunikasi Politik Islam: Narasi, dan Dampak dalam Konteks Politik Kontemporer. *Hikmah*, 18(1), 1–20.
- Meifilina, A. (2021). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 101–110.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Laili Azizah, F. N., Assabili, F., & Rahmadani, E. (2024). Citizenship and Political Rights: An Analysis of the Laws on the Right to Vote of Citizens in Indonesia. *Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik*, 2(1).
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Zahira, I., Muslimah, H., & Pratiwi, D. S. (2024). Kewarganegaraan sebagai hak konstitusional: Penegak hak sipil dan politik di Indonesia. *Konsensus*, 1(5), 153–167.
- Sadam, M., Al Araafi, F., & Arafah, Y. (2024). Demokrasi dan transformasi digital: Analisis digitalisasi politik melalui penerapan e-voting dalam meningkatkan mutu demokrasi. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 218–235.
- Sampurna, A., Taufiqurrohman, A., Nasution, A. F., Pulungan, N. L., Faidah, Y., & Daulay, V. D. Y. (2024). Konsep dan definisi komunikasi politik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 26772–26777.
- Sarkawi, Katimin, & Samosir, H. E. (2025). Strategi Komunikasi Politik dalam Sejarah Islam. *Journal Scientific of Mandalika*.
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. In *Seminar Nasional Pendidikan 2017* (pp. 1–1). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suryadi, K., Sukmayadi, V., & Anggraeni, N. S. (2021). Strategi Komunikasi Politik Digital Partai Politik Baru (Studi Kasus Pada Partai Solidaritas Indonesia). *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Waluyo, D. (2019). Pemahaman dan praktik komunikasi politik Indonesia di era digital. *Jurnal Diakom*, 2(2), 167–175. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.63>
- Widjayanto, F. R., & Naim, S. (2022). Strategi Komunikasi Politik Ma'ruf Amin dalam Kampanye Pemilu 2019: Pembelajaran untuk Politik Anti-Hoax. *Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Yumitro, G. (2013). Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 35–50.

Yusuf, M., & Mawalidin, J. (2022). Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Partai Politik Islam di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, IX(1), 66–85.

Zawawi, A. (2015). Politik dalam pandangan Islam. *Jurnal Ummul Qura*, V(1), 85.